



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 20 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

UNIT KERJA : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN

PENGEMBANGAN DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : HENDRA SUMARYANA
2. Jabatan : KEPALA BADAN
3. NHK : 742506

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 2.020.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 170 m2/170 m2 di KAB / KOTA TEMANGGUNG, HASIL SENDIRI Rp. 320.000.000
2. Tanah Seluas 1.270 m2 di KAB / KOTA TEMANGGUNG, HASIL SENDIRI Rp. 275.000.000
3. Tanah Seluas 3.808 m2 di KAB / KOTA TEMANGGUNG, HASIL SENDIRI Rp. 430.000.000
4. Tanah Seluas 2.471 m2 di KAB / KOTA TEMANGGUNG, HASIL SENDIRI Rp. 260.000.000
5. Tanah Seluas 3.500 m2 di KAB / KOTA TEMANGGUNG, HASIL SENDIRI Rp. 235.000.000
6. Tanah Seluas 2.215 m2 di KAB / KOTA TEMANGGUNG, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 170 m2/170 m2 di KAB / KOTA TEMANGGUNG, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 8.000.000

1. MOTOR, HONDA BEAT AT / NC 11 B1 C Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 2.500.000
2. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 5.500.000



C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	----
D. SURAT BERHARGA	Rp.	32.394.400
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	14.087.520
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	2.074.481.920
III. HUTANG	Rp.	294.552.298
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.779.929.622

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.